



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
UNIT KERJA : CORPORATE RELATIONS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADHIKA VISTA
2. Jabatan : GROUP HEAD
3. NHK : 1001450

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 850.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.976.809

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.789.359.654

Sub Total Rp. 5.200.336.463

III. HUTANG Rp. 484.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.716.336.463

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
UNIT KERJA : NETWORK & RETAIL FUNDING

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ASHIDIQ ISWARA
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK : 848378

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/240 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 457.500.000

1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2.5 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOBIL, KIA RIO 1.4 AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI LE250B Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. LAINNYA, 3SISTY SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOTOR, VESPA SPRINT S 150 TFT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 307.573.580

D. SURAT BERHARGA Rp. 251.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.158.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.424.073.580

III. HUTANG Rp. 1.056.750.302

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.367.323.278



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.